

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Auditing

2.1.1. Pengertian Audit

Menurut PSAK pengertian auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan tentang berbagai aktivitas dan kejadian – kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Arens dkk (Arens dkk 2011:4) dalam bukunya yang berjudul Auditing dan Jasa Assurance mendefinisikan auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Agoes (2012:4) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang profesional, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014) mendefinisikan auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan – pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari beberapa definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa auditing adalah pemeriksaan secara kritis dan sistematis untuk dapat memperoleh, mempelajari dan mengevaluasi bukti yang sudah dikumpulkan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan sehingga auditor dapat memberikikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.2 Jenis – Jenis Auditing

Menurut Agoes (2012) pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis, pembagian tersebut dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Sehingga jenis audit dapat dibedakan atas :

1. *General Audit* (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau ISA atau panduan audit entitas bisnis kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2. *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditan) yang dilakukan oleh KAP yang Independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atas masalah tertentu yang diperiksa karena prosedur audit yang dilakukan terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan terhadap pembayaran hutang usaha. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan pembayaran hutang usaha diperusahaan.

2.1.3 Bukti Audit

Arens, Elder, dan Beasley (2011:231-238), membagi jenis – jenis bukti audit menjadi delapan kategori :

1) Pemeriksaan Fisik

Inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva atau asset berwujud. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah asset benar – benar ada.

2) Konfirmasi

Penerimaan jawaban tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen dalam memverifikasikan akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Idealnya konfirmasi merupakan dokumen yang dibuat oleh klien yang dikirim oleh auditor dan diterima langsung oleh auditor tanpa melalui perusahaan.

3) Dokumentasi

Merupakan pemeriksaan atas dokumen – dokumen baik dalam bentuk kertas, bentuk elektronik atau media lainnya yang mendukung transaksi yang dicatat oleh klien dan pemeriksaan catatan klien sebagai bukti dari informasi yang telah didapat atau yang seharusnya ada di laporan keuangan.

4) Prosedur Analitis

Merupakan evaluasi informasi keuangan dan non keuangan dengan menggunakan perbandingan dan analisis hubungan sebab akibat untuk menentukan apakah saldo akun telah disajikan secara layak oleh klien.

5) Wawancara Dengan Klien

Bertanya jawab dengan klien bertujuan untuk mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan dari klien. Tanya jawab biasanya tidak dijadikan dasar dalam membuat kesimpulan tentang klien karena jawaban yang diperoleh auditor berasal dari pihak yang tidak independen dan mungkin memihak kepentingan klien. Untuk itu, auditor perlu mendapatkan *corroborating evidence* (bukti lain yang mendukung jawaban klien).

6) Rekalkulasi

Melibatkan pengecekan ulang atas sample kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang kalkulasi klien ini terdiri dari pengujian atas keakuratan perhitungan klien dan mencangkup prosedur seperti perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal dan buku tambahan, serta pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar dimuka.

7) Pelaksanaan Ulang

Mencangkup pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan atas prosedur lain dan pengecekan ulang atas suatu perhitungan, serta sampel perhitungan dan perpindahan informasi yang dilakukan klien selama periode audit.

8) Observasi

Penggunaan panca indera serta akal untuk menilai aktivitas tertentu. Jenis bahan bukti audit ini juga memerlukan tindak lanjut dengan bukti – bukti yang lebih menguatkan.

2.2 Tahapan Audit

Menurut Mulyadi (2011: 121-122) sebelum audit laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak perikatan audit dari calon kliennya. Auditor akan memutuskan untuk menerima perikatan audit dari calon kliennya dengan melaksanakan beberapa tahapan.

Tahapan audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap, yaitu :

1. Penerimaan Perikatan Audit.
2. Perencanaan Audit.
3. Pelaksanaan Pengujian Audit.
4. Pelaporan Audit.

2.2.1 Penerimaan Perikatan Audit

Perikatan adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Langkah awal dalam mengaudit suatu laporan keuangan ialah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan bahkan menghentikan perikatan audit dari klien yang berulang. Dalam perikatan perjanjian tersebut klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesional yang dimilikinya menurut Mulyadi.

Adapun langkah – langkah yang perlu ditempuh oleh auditor dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan audit dari calon kliennya yang terdiri dari 6 (enam) unsur yaitu :

1. Mengevaluasi Integritas Manajemen

Untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapat keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji.

2. Mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa

Mengidentifikasi pemakaian laporan audit, mendapat informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, serta mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Merupakan beberapa factor yang harus dipertimbangkan auditor dalam mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.

3. Menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan perikatan audit tersebut.

4. Mengevaluasi independensi

Auditor juga harus memastikan bahwa setiap professional yang menjadi anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi tim auditnya diragukan oleh pihak yang mengetahui salah satu dari delapan golongan informasi.

5. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan

Kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran professional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit.

6. Membuat surat perikatan

Dalam membuat surat perikatan audit, auditorlah yang membuatnya untuk calon kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh calon klien.

2.2.2 Perencanaan Audit

Menurut Agoes (2012) Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha, pengalaman mengenai suatu usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Masalah berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industry dimana satuan usaha tersebut beroperasi didalamnya.
- b. Kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut.
- c. Metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan.
- d. Penetapan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan.
- e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit.

- f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian.
- g. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubah pengujian audit, seperti resiko kekeliruan dan ketidakbenaran yang material atau adanya transaksi antar pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- h. Sifat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas (sebagai contoh, laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak/perjanjian).

2.2.3 Pelaksanaan Pengujian Audit

Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian (test), yang secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga golongan berikut ini :

a. Pengujian Analitik

Pengujian ini dilakukan oleh auditor pada tahap awal proses auditnya dan tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan oleh dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Pada tahap awal proses audit, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Sebelum seorang auditor melaksanakan audit secara rinci dan mendalam terhadap objek audit, ia harus memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perusahaan yang diaudit. Untuk itu, analisa ratio, analisa laba bruto, analisa terhadap laporan keuangan perbandingan (*comparative financial statements*) merupakan cara yang umumnya ditempuh oleh auditor untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan secara garis besar mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha klien.

b. Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian merupakan prosedur yang dirancang untuk memverifikasi efektifitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian terutama ditunjukkan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian.
2. Mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian.
3. Karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian.

c. Pengujian Substansif

Pengujian substansif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan adanya kesalahan moneter yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam infoemasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi kesalahan dalam :

1. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2. Tidak ditetapkannya prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
3. Ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
4. Ketidaktepatan pisah batas (*cut off*) pencatatan transaksi.
5. Perhitungan (penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian).
6. Perkerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi.
7. Pencantuman pengungkapan (*disclosure*) unsur tertentu dalam laporan keuangan.

2.2.4 Pelaporan Audit

Laporan hasil audit adalah merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu perkerjaan audit. Karena pelaporan audit merupakan alat pertanggung jawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada auditor. Secara umum laporan audit dapat didefinisikan sebagai laporan yang menyetakan pendapat auditor yang independen mengenai kelayakan atau ketetapan pernyataan klien bahwa laporan keuangannya disajikan secara

wajar sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang diterapkan secara konsisten dengan tahun – tahun sebelumnya.

Dalam laporan audit, mengungkapkan semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kesimpulan ini hanya akan dinyatakan bila auditor telah membentuk pendapat berdasarkan audit yang dilaksanakan sesuai GAAS. Laporan standar / laporan audit baku memiliki tiga paragraph, yaitu paragraph pendahuluan/pengantar, paragraph lingkup audit, dan paragraph pendapat atau opini.

Terdapat beberapa opini yang dapat diberikan oleh seorang auditor professional berkenaan dengan suatu pemeriksaan umum. Menurut SA 700, opini audit terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Opini Tanpa Modifikasi

Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Bentuk opini ini biasanya akan menampilkan opini sebagai berikut :

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan klien, namun ditambahkan dengan hal – hal yang memerlukan bahasa penjelasan.

2. Opini dengan Modifikasi

a. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan.

b. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat Tidak wajar diberikan jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan.

c. Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Pernyataan tidak memberikan pendapat, diberikan jika terdapat banyak pembatasan ruang lingkup audit secara hubungan yang tidak independen antara auditor dan klien. Kondisi tersebut tidak memungkinkan auditor untuk dapat menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan secara keseluruhan.

2.3 Teori Hutang Usaha

2.3.1 Pengertian Hutang Usaha

Menurut Sukrisno Agoes (2012) pengertian Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang dimasa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan dimasa lalu. Pengertian Hutang Usaha menurut Sukrisno Agoes (2012) yaitu hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan.

Menurut Rudianto (2011:275) pengertian hutang dalam bukunya Pengantar Akuntansi adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang dimasa lalu. Pengertian Hutang Usaha menurut Rudianto (2011:275) adalah hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan usaha perusahaan. Misalnya, pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit akan menghasilkan hutang usaha bagi perusahaan.

Liabilitas Kontinjensi didefinisikan dalam PSAK 57 (2012) sebagai (paragraph 10) :

1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih dimasa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan:atau

2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena (a) tidak terdapat kemungkinan besar perusahaan mengeluarkan sumberdaya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau (b) jumlah kewajiban tersebut tidak bisa diukur secara handal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hutang usaha adalah suatu perusahaan sangatlah penting untuk diperiksa karena hutang usaha adalah yang paling sensitive untuk diketahui banyak orang.

2.3.2 Audit Atas Hutang Usaha

Arens (2011:526) menyatakan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo Hutang Usaha, yaitu :

1. Saldo Hutang Usaha ditrial *balance* sesuai dengan saldo Hutang di buku besar (*detail tie-in*).
2. Hutang Usaha yang tercatat benar – benar ada (*existence*).
3. Seluruh Hutang Usaha telah tercatat di neraca (*completeness*).
4. Hutang Usaha telah dicatat secara akurat (*accuracy*).
5. Hutang Usaha telah diklasifikasikan dengan benar (*classification*).
6. *Cutoff* untuk Hutang Usaha telah dibuat dengan benar.
7. Hutang Usaha telah disajikan pada nilai yang dapat direalisasi (*realizable value*).
8. Perusahaan memiliki hak terhadap Hutang Usaha yang dimilikinya (*rights*).

2.3.3 Prosedur Pemeriksaan Hutang Usaha

Menurut Sukrisno Agoes, dalam buku “*Auditing* (Pemeriksaan Akuntan) 2012 prosedur pemeriksaan Hutang Usaha adalah :

1. Pelajari dan evaluasi *internal control* atas Hutang Usaha.
2. Minta rincian dari Hutang Usaha kemudian periksa penjumlahannya serta cocokan saldonya dengan saldo utang di buku besar.
3. Untuk Hutang Usaha cocokkan saldo masing – masing *supplier* dengan saldo menurut *subsidiary ledger* Hutang Usaha (jika jumlah *suppliernya banyak, tidak usah 100%*).
4. Secara tes basis (*sampling*), periksa bukti pendukung dari saldo hutang kepada beberapa *supplier* perhatikan apakah angkanya cocok *dengan purchase requisition, purchase order, receiving report* dan *supplier invoice*. Periksa juga perhitungan matematis (*mathematical accuracy*) dari dokumen – dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang.
5. Seandainya terdapat *monthly statement of account* dari *supplier* maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut *statement of account* tersebut dengan saldo *subsidiary ledger* utang.
6. Pertimbangan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa *supplier* baik yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya.
7. Periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) (*subsequent payment*) untuk mengetahui apakah ada liabilitas yang belum dicatat (*unrecorded liabilities*) per tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan (neraca).
8. Seandainya ada hutang kepada bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit *overdraft*, maka kirim konfirmasi ke bank, periksa surat perjanjian kreditnya dan buat *excerpt* dari perjanjian kredit tersebut, dan periksa otorisasi dari direksi untuk perolehan kredit bank tersebut.
9. Seandainya ada hutang pemegang saham atau direksi atau dari perusahaan afiliasi, yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya dan periksa apakah ada pebebanan bunga atas pinjaman tersebut.
10. Seandainya ada saldo debit dari hutang usaha maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang dibeli

tetapi sudah dilunasi. Kalau jumlahnya besar (material) harus direklasifikasi sebagai piutang.

2.3.4 Penjelasan Audit Prosedur

1. Penjelasan dan evaluasi internal control atas hutang usaha.

Dalam hal ini auditor dapat menggunakan *internal control questionnaires*, *flow chart* untuk penjelasan *narrative*. Karena hutang usaha merupakan bagian dari siklus pembelian, hutang usaha dan pengeluaran kas, maka bisa digunakan *internal control questionnaires* untuk pembelian, hutang usaha dan pengeluaran kas. Sedangkan *flow chart* dapat digunakan untuk mengetahui penjelasan *narrative* tentang pembelian, utang usaha, dan penerimaan kas.

2. Minta rincian dari Hutang Usaha kemudian periksa penjumlahannya serta cocokan saldonya dengan saldo utang di buku besar.

Rincian ini harus disiapkan oleh klien. Jika rincian yang diberikan oleh klien tidak cocok dengan saldo buku besarnya atau terdapat kesalahan penjumlahan, maka auditor harus mengembalikan rincian tersebut kepada klien untuk diperbaiki.

3. Untuk hutang usaha cocokan saldo masing – masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger hutang usaha.

Jika jumlah supplier itu banyak (misalkan seratus supplier) dan internal control client baik, maka percocokan ke subledger bisa dibatasi jumlahnya. Seandainya ditemukan perbedaan antara saldo di rincian hutang usaha dan saldo di subledger hutang usaha, harus diminta agar klien yang mencari penyebab perbedaan tersebut.

4. Pertimbangan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak satu tahun sebelumnya.

Auditor tidak harus mengirim konfirmasi untuk hutang usaha, karena sumber pencatatan hutang usaha berasal dari luar perusahaan (misalnya manufaktur dari *supplier*) dan tujuan konfirmasi adalah untuk memeriksa keakuratan data akuntansi klien. Jadi lain dengan konfirmasi piutang yang merupakan audit prosedur standar yang harus dilakukan oleh auditor. Apalagi jika sebagian besar *supplier* terbiasa untuk mengirim *monthly statement of account*, maka auditor hanya perlu mencocokkan saldo hutang usaha menurut rincian dengan saldo menurut *monthly statement of account* tersebut.

5. Periksa pembayaran setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilities per tanggal laporan posisi keuangan (neraca) dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo hutang per tanggal posisi keuangan (neraca).

Caranya adalah dengan me-review buku pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Perhatikan apakah ada pembayaran – pembayaran diperiode sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) yang menyangkut pembelian atau biaya tahun yang diperiksa yang belum dicatat sebagai liabilitas jangka pendek per tanggal posisi keuangan (neraca). Periksa juga notulen rapat direksi, pemegang saham, dewan komisaris untuk mengetahui apakah ada kewajiban perusahaan, misalnya pembagian bonus, yang baru akan dibayar periode berikutnya dan belum dicatat sebagai liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan (neraca). Auditor harus juga memeriksa bukti – bukti pembayaran di *subsequent period* yang berkaitan dengan kewajiban yang terjadi di tahun yang diperiksa.

6. Periksa dasar perhitungan *accrued expense* yang dibuat oleh perusahaan, apakah reasonable (masuk akal) dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Perlu diketahui bahwa memperkecil laba, bisa saja perusahaan membesarkan jumlah *accrued expense*-nya. Dengan memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) auditor bisa mengetahui apakah jumlah yang di *acured* betul – betul dibayar ditahun berikutnya dalam jumlah yang kurang lebih sama. Selain itu dicatat

diperiode sesudah tanggal laporan posisi keuangan (neraca), sehingga harus di usulkan audit *adjustment*-nya oleh auditor.

7. Kirim konfirmasi kepada penasehat hukum perusahaan.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari *legal consultant* atau pengacara. Misalnya, ada tuntutan di pengadilan per tanggal laporan posisi keuangan (neraca) prosesnya belum selesai. Seperti diketahui di proses pengadilan memakan waktu yang cukup lama (mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung). Hal ini menyebabkan timbulnya *contingency liabilities*, yaitu liabilitas yang mungkin terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya.